

# "Holopis Kuntul Baris" Sesudah 56 Tahun Merdeka

Franz Magnis-Suseno

Guru Besar Filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta

Peringatan Proklamasi Kemerdekaan tahun ini dapat kita rayakan dengan sedikit lebih lega daripada tahun-tahun sebelumnya. Kabinet Gotong Royong di bawah Presiden baru Megawati Soekarnoputri melegakan kualitasnya.

Apalagi Presiden membuktikan bahwa Beliau tidak bisa di-push over. Beliau berhasil menggolkan kabinet yang dikehendaki sendiri dan yang tetap dapat diterima partai-partai. Bravo!

Kita juga lega karena peralihan dari kabinet Abdurrahman Wahid ke kabinet Mega berjalan lancar, tanpa adanya pergolakan. Ini tentu juga tanda bahwa masyarakat sudah merasa jemu dengan segala ramai-ramai politik tak produktif. Padahal, demokrasi hanya bisa jalan apabila masyarakat bersemangat.

Bagaimanapun apabila kabinet baru berhasil memberikan kinerja yang bagus, ada harapan bahwa kita dapat ke luar dari terowongan krisis yang sudah berlangsung sejak empat tahun.

## Masih mengkhawatirkan

Namun, situasi bangsa masih mengkhawatirkan. Sekadar agar kita ingat saja: 1) Kelelahan dan kebiadaban sehari-hari masih merajalela di mana-mana. 2) Hukum tidak berkuasa dan aparat penegak hukum tak berwibawa.

3) Pelaksanaan otonomi daerah amburadul dan berpotensi menjadi ancaman serius pelaksanaan kehidupan bangsa dalam pelbagai dimensi. 4) Ekonomi belum mampu memberikan pekerjaan kepada generasi muda. 5) Konflik-konflik amat berbahaya belum terselesaikan, baik yang komunal seperti di Maluku, di daerah Poso,

dan di Kalimantan, maupun yang regional, seperti di Aceh dan potensial di Irian Jaya.

Yang tidak kurang mengkhawatirkan, mengingat mutu kepemimpinan nasional memaikan peranan kunci dalam penyelesaian semua masalah tadi: tiga tahun sesudah jatuhnya Orde Baru, dan dua tahun sesudah untuk pertama kalinya seorang demokrat yakin dipilih secara demokratis, demokrasi kita belum juga mantap.

Ada perbedaan-perbedaan mendasar yang belum berhasil dipecahkan:

1) Bagaimana masa lampau kita harus ditangani? Apa arti dan cakupan rekonsiliasi nasional? 2) Bagaimana menyikapi tindak korupsi raksasa dan pelanggaran kerus terhadap hak-hak asasi manusia di masa lampau, khususnya yang menyangkut mereka yang bertanggung jawab atasnya?

3) Apakah membangun kehidupan demokratis sejati mengandaikan dilakukannya potongan radikal dengan masa lampau ("singkirkan semua sosok Orde Baru", "bongkar Golkar!" dan seterusnya), atau lebih baik memakai cara kompromi dan politik inklusif?

Selain itu, entah sebagai sisa atau warisan roh busuk Orde Baru atau tidak, ada beberapa gejala yang amat buruk muncul ke permukaan.

1) Teror bom seakan-akan menjadi peristiwa biasa, dengan segala macam sasaran, tetapi di antaranya semakin mencolok gereja-gereja. 2) Kesan bahwa para dalang teror tak mau di-



Artikel ini terbit Kamis, 16 Agustus 2001

tindak, jadi bahwa ada benteng-benteng kejahatan yang dengan impunity dapat bergerak di antara kita.

3) Hasutan buruk terhadap kelompok-kelompok populis, seperti PRD dan LSM-LSM yang persis sama polanya dengan apa yang terjadi sesudah tanggal 27 Juli 1996 (yang sendiri tak berani dibuka dalang-dalang dan koordinator-koordinatornya).

4) Penangkapan-penangkapan oleh aparat resmi—aparat sama yang tidak berhasil menangkap para dalang teror bom dan para koruptor—terhadap mereka yang lebih keras bersuara menentang kejahatan, premanisme dalam aparat, dan impunity itu.

5) Warisan Orde Baru bahwa

para korban (korban ketidakadilan sosial, korban kekerasan terhadap perempuan, korban political witchhunt Orde Baru), serta mereka yang menyuarakannya, disulap dijadikan pelaku.

Semua itu menghadapkan kita pada pertanyaan mendasar: apa makna kebangsaan Indonesia bagi kita semua: bagi elite yang mewacanakannya, bagi aparat, bagi kaum agama, bagi "rakyat biasa"?

## Kehilangan dua tahun?

Jelas, litani masalah berat (dan super-berat) itu tadi mesti membuyarkan segenap optimisme murahan. Timbul pertanyaan: apakah dua tahun terakhir harus dianggap lost years yang sama sekali tidak mem-

bawa kemajuan dalam membangun kehidupan bangsa yang adil, beradab, dan demokratis?

Jawabannya, menurut saya, harus, tidak! Dua tahun dalam pemerintahan Sang Kiai—yang melawan akal sehat, berhasil dibujuk meninggalkan padepokannya, lalu terpaksa bersilat memakai jurus the drunken master, akhirnya me-knock-out diri sendiri untuk kembali ke padepokannya—merupakan proses belajar amat berharga bagi bangsa Indonesia, khususnya elitnya.

1) Kita belajar bahwa seorang perempuan dapat saja kita dukung oleh semua, menjadi pemimpin Indonesia. Artinya, kita sudah belajar bahwa walaupun kita mempunyai macam-macam pandangan, tetapi akhirnya agama sendiri mengajarkan bahwa keselamatan bangsa dan negara harus didahulukan.

2) Baik sipil maupun militer, meski barangkali belum semua, sepakat tentang pentingnya adanya militer yang kuat, profesional, tetapi yang terfokus pada fungsi pengamanan bangsa dan negara, sedangkan memerintah bangsa adalah kewajiban dan tugas kita semua dalam mekanisme transmisi demokratis.

Dengan lain kata, militer dapat mengidentifikasi diri dengan peran melindungi bangsa dan negara tanpa peran sosial-politik khusus, dan sipil meyakini bahwa bangsa Indonesia memerlukan militer yang profesional dan percaya diri.

3) Kita menyadari bahwa pengerahan massa dalam demokrasi adalah terlarang, jadi bahwa bagaimanapun juga, kita harus membangun kehidupan demokratis secara prosedural, institusional, dan konstitusional.

4) Kita menyadari bahwa persatuan bangsa mengandaikan desentralisasi pengambilan keputusan, tetapi bahwa desentralisasi itu harus dilaksanakan secara rasional, tertib, dan de-

ngan memperhatikan kebersatuan bangsa dan kesetiakawanan di antara kita semua.

5) Sebuah kenyataan luar biasa adalah bahwa konflik-konflik di Maluku dan Poso tidak diizinkan meluap, tidak merusak kesediaan untuk saling menerima, tak membuat komunitas agama yang paling kuat memusuhi komunitas agama yang minoritas, tak mengubah kesediaan untuk menerima segenap warga bangsa, dengan latar belakang agama mana pun, sebagai pemilik dan penghuni negara kita.

Dengan kata lain lagi, Pancasila-lah, konsensus dasar bangsa untuk membangun kehidupan bersama secara non-diskriminatif, dibarui, dan dikonfirmasi dalam dua tahun terakhir ini.

6) Dengan pasangan Presiden dan Wakil Presiden sekarang, sama halnya dengan pasangan yang sebelumnya, kita menyatakan kesediaan bahwa masalah-masalah kita hanya dapat dipecahkan dengan wawasan ataupun cara yang inklusif.

## "Holopis kuntul baris"

Dengan memberi nama "gotong royong" kepada kabinet ini (kalaupun ada yang merasa kurang enak asosiasinya, tetapi tak apalah, bukan?), Presiden Megawati mengajak kita berholopis kuntul baris. Bung Karno suka dengan seruan itu.

Kita harus mau bersama, dalam pluralitas yang merupakan kenyataan bangsa Indonesia.

Ciri inklusif pimpinan negara dan keseimbangan antara harapan partai-partai pendukung dan tuntutan profesionalitas kabinet menyediakan kondisi awal bagus, baik bagi pemerintah dan kekuasaan legislatif maupun bagi masyarakat sendiri untuk mulai menyelesaikan masalah-masalah kita.

Di mana kita juga sudah cukup dewasa untuk menerima

kalaupun kinerja kabinet baru tidak sampai mencapai nilai 10. Nilai 8,2 sudah cukup untuk maju dalam perang suci melawan semua masalah itu, inggih ta, Pak Amien?

Apa yang harus dilakukan? Penulis tidak perlu mengurui pemerintah. Masalah-masalah yang perlu ditangani sudah disebut. Tentu pelajaran dua tahun terakhir tadi harus menjadi milik kita dan kita kembangkan terus. Namun ada tiga hal yang mau saya angkat di sini, yang kiranya amat menentukan:

1) Kita betul-betul harus menerima kenyataan pluralitas multidimensi bangsa, ya bangsa Indonesia, sebagai sesuatu yang positif dan hakiki, dan karena itu meyakini dalam teori dan praktik bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; tatanan konstitusional; tatanan hukum; dan kehidupan nyata bersama, harus inklusif.

Jadi bahwa segala pemecahan masalah-masalah kita yang bersifat eksklusif hanya akan menghasilkan penindasan, kekerasan, dan pencurahan darah, dan akan mengancam kesatuan bangsa.

2) Untuk menegakkan kembali wibawa hukum dan monopoli tindak memaksa di tangan aparat kepolisian dan angkatan bersenjata. Segala satgas, laskar, milisi, pasukan swasta, dan sebagainya perlu dibubarkan.

3) Para legislator harus berani membuat pembaruan konstitusional yang diperlukan agar tidak lagi ada keraguan-raguan tentang wewenang lembaga-lembaga tertinggi, ada kemungkinan judicial review, dengan tujuan agar terjamin adanya pemerintah yang kuat kedudukannya dan sekaligus terkontrol oleh DPR.

Jadi memang perlu kita rela berwawasan inklusif dan bergotong royong untuk memastikan penyelamatan bangsa. Holopis kuntul baris!

